ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2010-2017

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Indri Sukmawati

No. Mahasiswa : 15313245

Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2010-2017

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Indri Sukmawati

No. Mahasiswa : 15313245

Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skrisps ini tidak terdapat unsur karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu ddalam naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.".

Yogyakarta, 10 Januari 2019

Penulis



(Indri Sukmawati)

iii

PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN

2010-2017

Diajukan Oleh :

Nama : **Indi Sukmawati**

No. Mahasiswa : **15313245**

Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

Yogyakarta, 10 Januari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Sehyu diujikan
10/1/2019.

Awan Setya Dwantara Drs.,M.Ec.Dev.

iv

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2010-2017

Disusun Oleh : **INDRI SUKMAWATI**

Nomor Mahasiswa : **15313245**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 25 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Awan Setya Dewanta, Drs .,M.Ec.Dev. .....

Penguji : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

" Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu sudah selesai dengan suatu urusan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".

(Q.S.Al-Insyiroh : 6-8)

" Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakalah kepada Allah supaya kamu menang".

(Q.S Al Imran : 200)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
2. Kedua Orang tua saya, Ibunda Linda Aryani A.Md. dan Bapak Hendra S.sos.
3. Adik saya, Putri Helen Sukmawardhani, Muhammad Teguh (Alm) dan Hanifah Akila Aulia
4. Semua Keluarga dan sahabat yang selalu menyayangi dan mendukung saya

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas Kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Karena dengan syafatnya kita dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi Allah SWT.

Penelitian yang berjudul "**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2010-2017".** Enelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini terdapat banyak kelemahan maupun kekurangan, segala bentuk dari kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyusunan penelitian ini sangat dibutuhkan oleh penulis demi kesempurnaan penyusunannya. Diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang maha Rahman, maha Penolong setiap hamba-Nya, yang telah melimpahkan karunia-Nya serta Ilmu pengetahuan yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Jaka Sriyana,SE.,M.Si.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
3. Agus Widarjono, SE.,MA.,Ph.D selaku Keua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia
4. Awan Setya Dwantara Drs.,M.Ec.Dev. selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya telah banyak mengarahkan dan memberikan berbagai masukan serta nasehat dalam kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan banyak ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almameter ini. Dosen beserta staf Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. DR.Drs.H.Edward Anthony,M.M. selaku Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan yang telah banyak membantu baik sebagai seorang pemimpin, maupun sebagai seorang paman yang banyak memberikan banyak masukan, dukungan dengan cara penyampaian yang terlepas dari jabatannya sehingga mampu memberikan wawasan yang luas dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya Ibunda Linda Aryani A.Md dan Bapak Hendra S.Sos yang tak terhingga telah memberikan kasih sayangnya yang tidak akan

pernah tergantikan dan terbalaskan, serta dukungan moral yang tak terhingga nilainya ,maupun moril bagi penulis hingga sampai saat ini.

8. Kepada adik-adik saya Putri Helen Sukmawardhani, Muhammad Teguh (Alm) dan Hanifah Aqila Aulia yang telah memberikan banyak semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. dan menjadi salah satu alasan rindu untuk pulang.
9. Kepada seluruh keluarga, yang mendukung dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman yang memberikan kan semangat, tawa dan merelakan banyak waktu nya selama lima tahun ,Asep Herjana dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperantauan menemani di almamater tercinta “Sayangku” Neli Cahyani , Desi Amelia Putri, Cory Fatma Rizki dan Iga Septi Mawarni yang menjadikan keluarga kedua ditanah orang dan juga yang telah memberikan banyak motivasi, saran selama menuntut ilmu ditanah orang.
12. Teman seperjuangan Neli Cahyani, teman yang mampu saling memotivasi, tempat berkeluh kesah dalam menapaki setiap langkah dalam proses mendapatkan gelar Sarjana Strata 1
13. Teman seperjuangan dan satu kosan, Putri Okta Prima dkk yang memberikan aku tawa dan udara segar Yogyakarta dikala kesedihan maupun bahagia.

14. Teman seatap sekosan mbak Arvika Shinta Giffari, yang banyak membantu dan berbagi keluh kesah dalam segala hal.
15. Sahabat- sahabatku sejak kita sama –sama dari bangku Taman Kanak-Kanak hingga saat ini "Bebekan" Mardyah Widiyasmah, Aprila Pangestu, Bagus Dwi Laksana, Mando Wanang Paselo, Deby Monica Anjani, Susi Susilowati dan Novi Postalia. Kalian yang selalu memberikan aku ruang berbagi cerita, walaupun kalian semua punya kesibukan yang membuat kita jarang untuk bertemu tapi kalian mampu memberikan tawa yang tak kudapatkan ditanah orang.
16. Teman UKM Tenis Lapangan Universitas Islam Indonesia, yang dapat memberikan kesan yang unik pada setiap kepengurusannya, dan menjadi ruang dalam kejenuhan aktivitas
17. Ucapan terima kasih bagi berbagai pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. yang mana tidak mampu untuk diucapkan satu persatu karena berbagai keterbatasan yang ada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin

    Wassalammualaikum.Wr.Wb

Yogyakarta,31 Desember 2018

Penulis

Indri Sukmawati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER …….....……..i

HALAMAN JUDUL……...……..ii

HALAMAN BEBAS PLAGIARISME……iii

PENGESAHAN……..……..iv

PENGESAHAN UJIAN……...…..……v

MOTTO……..……..vi

HALAMAN PERSEMBAHAN…….....…….……vii

KATA PENGANTAR……...……viii

DAFTAR ISI……...…….xi

DAFTAR TABEL……...……...…….xv

DAFTAR GAMBAR……..xvi

ABSTRAK……..……..xvii

ABSTRACK ……...…….xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian..... 6

1.4 Manfaat Penelitian..... 6

1.5 Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
2.1 Tinjauan Pustaka 8
2.1 Landasan Teori 16
2.1.1 Otonomi Daerah 16
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah 16
2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah……. ….16
2.1.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah…….....……..17
2.1.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah…..……..…18
2.1.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah..……..…..18
2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan Daerah 19
2.1.3.1 Rasio Efektivitas…….....……19
2.1.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....…….....……24
2.1.3.3 Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah…….....……24
2.2 Kerangka Berfikir 26
BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1 Objek Penelitian 30
3.2 Jenis dan Sumber data 30
3.3 Metode Pengumpulan Data 30
3.4 Metode Analisis Data 30
3.4.1 Rasio Efektivitas 31
3.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 32

3.4.3 Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah 33
3.5 Definisi Operasional Variabel 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
4.1 Gambaran Umum Daerah 36
4.1.1 Geografis Kabupaten Way Kanan 36
4.1.2 Topografis Kabupaten Way Kanan 37
4.1.3 Sejarah Pembentukan Kabupaten Way Kanan 37
4.1.4 Hari Jadi Kabupaten Way Kanan 39
4.1.5 Keadaan Keuangan Kabupaten Way Kanan 39
4.2 Pembahasan 41
4.2.1 Analisis Rasio Keuangan 41
4.2.1.1 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah……....……..41
4.2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ……..……..45
4.2.1.3 Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah ……...…49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 54
5.1 Kesimpulan 544
5.2 Saran 56
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Dana Perimbangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 3
Tabel 1.2 Luas Area Tanaman Kopi Robusta Perkebunan Rakyat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014 (Hektar) 4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 9
Tabel 2.2.3.1 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah 20
Tabel 2.2.3.2 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah..... 22
Tabel 2.2.3.3 Kriteria Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah 25
Tabel 3.5 Definisi Operasional Variabel..... 34
Tabel 4.2.1.1 Rasio Eektivitas dan Trend Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 42
Tabel 4.2.1.2 Rasio Eektivitas dan Trend Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 46
Tabel 4.2.1.3 Rasio Eektivitas dan Trend Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017..... 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 27
Gambar Grafik 4.1.5 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 40
Gambar Grafik 4.2.1.1 Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 44
Gambar Grafik 4.2.1.2 Rasio Kemanandirian Keuangan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 48
Gambar Grafik 4.2.1.3 Rasio Desentralisasi fiskal Keuangan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 52

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul " Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2017". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan melalui rasio efektivitas,rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiscal serta didukung trend dari masing-masing rasio. Jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskritif kualitatif. Variabel yang digunakan adalah rasio efektivitas,rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiscal serta trend dari masing-masing rasio. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Laporan APBD Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017.

Hasil penelitian menunjukan 1) Rasio Efektivitas keuangan daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2017 secara rata-rata sebesar 96,49 persen dengan kriteria efektif. Serta trend rasio efektivitas sebesar 109 persen yang artinya terjadi perkembangan pada rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Way Kanan. 2) Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kann tahun 2010-2017 secara rata-rata sebesar 3,91 dengan kriteria rendah sekali dan trend rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan sebesar 183 persen menunjukan terdapat perkembangan. 3) rasio desentralisasi fiscal Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2017 secara rata-rata sebesar 3,09 dengan kriteria sangat rendah dan trend rasio desentralisasi fiskal sebesar 38 persen menunjukan tidak ada perkembangan.

***Kata Kunci** : Kinerja Keuangan Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan Desentralisasi Keuangan Daerah.*

ABSTRAK

This study entitled "Analysis of Regional Financial Performance of the Way Kanan District Government in 2010-2017". This study aims to identify the financial performance of the Way Kanan District Government through effectiveness ratios, independence ratios and fiscal decentralization ratios and supported the trend of each ratio. The type and research method used in this study are qualitative descriptive qualitative. The variables used are effectiveness ratios, independence ratios and fiscal decentralization ratios and trends of each ratio. The technique in this study uses documentation techniques. This study uses secondary data from the Way Kanan District Budget report in 2010-2017.

The results of the study showed 1) the financial effectiveness ratio of Way Kanan Regency in 2010-2017 by an average of 96.49 percent with effective criteria. And the trend of the effectiveness ratio is 109 percent, which means that there is a development in the financial effectiveness ratio of the Way Kanan Regency. 2) The financial independence ratio of Way Kann Regency in 2010-2017 is an average of 3.91 with very low criteria and the trend of financial independence ratio in Way Kanan Regency by 183 percent shows a development. 3) the ratio of fiscal decentralization to Way Kanan Regency in 2010-2017 by an average of 3.09 with very low criteria and a trend of fiscal decentralization ratio of 38 percent indicating no development.

***Keywords**: Regional Financial Performance, Regional Financial Effectiveness, Regional Financial Independence and Decentralization of Regional Finance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan secara merata merupakan perwujudan dari pembangunan daerah. Pembangunan yang ada didaerah dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Pengelolahan yang dilakukan secara berkala dan seimbangan.sehingga nantinya pembangunan tersebut memiliki keserasian antar daerah. Hal itulah yang menjadi cerminan bagi pembangunan nasional.(Chodariyanti, 2015)

Pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan pendanaan dalam pelaksanannya. Seiringan dengan pembiayaan dalam menggali potensi yang ada didaerah, yang terpenting adalah menumbuhkan pemahaman mengenai kemampuan dalam perencanaannya. Oleh sebab itu, setiap bidang yang dibangun membutuhkan pendanaan anggaran yang efektif untuk menjalankan setiap program yang direncanakan (Sriyana, 2009)

Efektivitas penganggaran dapat diukur dengan menggunakan rasio. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pembiyaan secara mandiri dalam menjalankan berbagai macam sarana prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kemudian untuk menciptkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Pemanfaatan

sumber daya yang ada seperti memaksimalkan penggunaan dan penggalian terhadap potensi pajak dan retribusi daerah. Kegunaan rasio kemandirian keuangan daerah juga digunakan sebagai cerminan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dengan transfer Pemerintah Pusat serta cerminan dari partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.(Saputra, 2014)

Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Way Kanan merupakan objek kajian dari penelitian kinerja keuangan daerah. Kabupaten Way Kanan dipilih menjadi objek penelitian dikarnakan Kabupaten ini masih memiliki ketergantungan yang besar pada pendanaan dari transfer pemerintah pusat. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat ternyata terus di barengi dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Berikut tabel dana perimbangan dan pada Kabupaten Way Kanan

Tabel 1.1

Dana Perimbangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017

No	Tahun	Dana Perimbangan (triliun)
1.	2010	408.205.931.484,00
2.	2011	475.517.323.333,00
3.	2012	579.328.013.519,00
4.	2013	651.613.183.342,00
5.	2014	701.026.300.811
6.	2015	780.633.656.977,00
7.	2016	908.456.210.688,00
8.	2017	1.034.484.642.816,00

Selain itu, Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten dengan 74% merupakan daerah yang didominasi oleh perkebunan. Tanaman perkebunan yang ungul di Kabupaten Way Kanan diantaranya adalah karet, kelapa sawit,lada, cengkeh dan Kopi. Kemudian Komiditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Way Kanan adalah perkebunan Kopi. Dimana, Kabupaten Way Kanan merupakan Kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Lampung yang memiliki perkebunan rakyat kopi jenis Robusta setelah Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Luas Area Tanaman Kopi Robusta Perkebunan Rakyat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014 (Hektar)

Kabupaten/Kota	Luas Area
Lampung Barat	65.010
Lampung Selatan	1.239
Lampung Utara	18.482
Lampung Tengah	1.549
Tanggamus	43.897
Tulang Bawang	133
Tulang Bawang Barat	170
Pringsewu	7.630
Mesuji	249
Metro	2
Pesawaran	249
Way Kanan	22.563
Bandar Lampung	217
Pesisir Barat	6.934

Sumber : Badan Pusat Statistik,2018

Berdasarkan Tabel 1.2, dilihat bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki posisi terbesar ketiga dalam Luas area perkebunan kopi jenis robusta di Provinsi Lampung. Hal tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki kemampuan Sumber Daya Alam yang cukup dalam perkebunan untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah. me didukung oleh perkebunan kopi, Kabupaten Way Kanan juga didukung

dengan adanya keindahkan alam yang dimiliki. Seperti air terjun. Dimana Kabupaten Way Kanan dijuluki sebagai Kabupaten dengan 1.000 air terjun dengan menawarkan berbagai macam keindahan alam yang dapat membuat mata terpanah. Namun, hal tersebut tidak didukung dengan kemajuan infrastruktur. Dimana jarak yang ditempuh cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Way Kanan. kemudian tidak didukungnya akses jalan dan transportasi yang masih kurang baik dalam mendukung adanya objek wisata tersebut. Sehingga terkadang wisatawan yang datang kurang berminat sehingga belum terekspos dengan baik. (Hakim, 2017)

Berdasarkan penguraian permasalahan-permasalahan yang muncul,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian " ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010-2017".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2010-2017
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2010-2017
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan rasio desentralisasi keuangan pada tahun 2010-2017

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2010-2017
2. Untuk menganalis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2010-2017
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan rasio desentralisasi keuangan pada tahun 2010-2017

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas,maka manfaat yang dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan menegenai rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio desentralisasi keuangan daerah serta trend.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam membuat kebijakan. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang menjadi potensial terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar dapat terciptanya kemandirian bagi daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skrispi ini menggunakan sistematika peembahasan yang terbagi menjadi lima sub bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini disajikan mengenai latar belakang dari penelitian, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Dimana pada bab ini merupakan sebuah gambaran secara garis besar dari penelitian secara keseluruhan**.**

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan mengenai kerangka teoritis. Dimana kerangka teoritis merupakan sebuah penelitian terdahulu dan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian analisis kinerja keunagan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2017.

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini membahas mengenai system metode yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai objek dari penelitian,variable

yang digunakan dalam penelitian, bentuk data ,metode dalam pengumpulan data serta metode yang dianalisis.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian. Penjelasan tersebut berupa deskriptif dari hasil analisis yang menjelaskan mengenai objek dari penelitian yang dijabarkan melalui pembahasan dari hasil akhir dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, kan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis yang di lakukan dalam penelitian. Menjabarkan mengenai keterbatasan dari jalannya penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis	Metode	Variabel
Kesuma & Arianti (2013) ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008 - 2012	Metode analisis deskriptif kuantitatif	- Rasio Kemandirian - Rasio Efektivitas
Ringkasan Hasil		
Bahwa pemerintah kota Bandar Lampung memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Hal tersebut disebabkan oleh kontribusi PAD yang masih rendah. Berdasarkan rasio efektivitas bahwa kota Bandar Lampung memiliki katagori sangat efektif. Dikarnakan tingkat target dan realialisasi PAD yang terus meningkat dan memiliki presentase yang cukup tinggi.		
Nurhayati (2015) ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR	Metode analisis desktiptif kuantitatif	- Rasio kemandirian - Rasio Ketergantungan Keuangan,

KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU		- Rasio Eektivitas dan Efesien, - Rasio Aktivitas dan - Rasio Pertumbuhan
Ringkasan Hasil		
Berdasarkan rasio kemandirian daerah bahawa kabupaten Rokan Hulu meiliki katagori sangat rendah dan rasio ketergantungan daerah Rokan Hulu sangat tinggi Rasio Kemandirian Daerah berkatagori sangat rendah. Sedangakn rasio efektivitas menghasilakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu masuk dalam katagori efektif. Sedangkan berdasarkan rasio pertumbuhan bahwa PAD Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan.		
Vurry, Suwendra, Yudiaatmaja, & Manajemen (2014) ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN TREND PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2004-2013	Metode analisis deskriptif kauntitatif	- Rasio kemandirian Keuangan, - Rasio Efektivitas, - Rasio Efesien, IKR dan Trend

Ringkasan Hasil		
Bahwa rasio kemandirian dikabupaten Buleleng masuk dalam katagori rendah sekali dan berdasarkan rasio efektivitas masuk dalam katagori sangat efektif. Sedangkan rasio efesien masuk dalam katagori sangat efesien. Sedangkan rasio IKR masuk dalam katagori sangat kurang dan berdasarkan trend kemandirian bahwa terdapat perkembangan terhadap kemandirian keuangan di Kabupaten Buleleng		
Haryani (2016), ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN	Analisis deskriptif kuantitatif	- Rasio Kemandirian - Keuangan Daerah Rasio Efektivitas
Ringkasan Hasil		
Kabupaten Bireuen memiliki tingkat ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat yang cukup tinggi yang ditunjukan oleh rasio kemandirian keuangan yang instruktif sebesar 6,32 persen. Kemudian bahwa kemampuan PAD di Kabupaten Bireuen belum mampu untuk menunjukan tingkat efektifvitasnya sehingga menunjukan kontribusi yang tidak efektif.		
Ramadhani (2016), ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN	Analisis deskriptif kuantitatif	- Rasio Efektivitas - Rasio Kemandirian - Trend Ffektivitas - Trend Kemandirian

DAERAH DI KOTA TARAKAN TAHUN 2010-2015		
Ringkasan Hasil		
Rasio kemandirian menunjukan bahwa Kota Tarakan memiliki kemampuan yang rendah tetapi memiliki trend yang mengalami perkembangan kemudian berdasarkan rasio efektivitas bahwa Kota Tarakan berada pada kataogori efektif yang didukung oleh trend efektivitas yang mengalami perkembangan		
Pangenggar (2017) , ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2005-2014	Analisistif deskriptif kuantitatif	- Rasio Kemandirian - Rasio Efektivitas - Rasio Derajat Desentralisasi - Rasio Efesiensi - Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
Ringkasan Hasil		
Dari hasil penelitian bahwa Rasio kemandirian menunjukan bahwa di didaerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali terdapat daerah yang memiliki kemandirian yang tinggi dan terdapat juga daerah yang kemandirian keuangannya rendah. Kemudian rasio efektivitas menunjukan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi bali sudah menunjukan tingkat sangat efektif. Sedangkan rasio desentralisasi dan rasio efesinse masih berada pada katagori rendah.		
Wurangian, Engka, & Tolosang (2017) ANALISIS KEMAMPUAN	Analisis deskriptif kauntitatif	- Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015)		- Rasio Derajat Desentralisasi Fiscal - Rasio Pertumbuhan
Ringkasan Hasil		
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa Kota Tomohon belum dapat mengelolah dalam sumber-sumber yang menjadi Pendapatan Asli Daerah dimana ditunjukan dengan kemandirian keuangan yang rendah sekali dan rasio derajat desentralisasi yang sangat kurang serta didukung dengan rasio pertumbuhan yang sangat kurang.		
Putri (2018) ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	Metode analisis deskriptif kuantitatif	- Rasio Efektivitas - Trend Efektivitas, - Rasio Kemandirian, - Trend Kemandirian, - Rasio Desentralisasi Fiskal - Trend Desentralisasi Fiskal
Ringkasan Hasil		
Secara rata-rata bahwa efektivitas kinerja keuangan di kota Bandar Lampung sudah efektif Sedangkan secara trend efektivitas kota Bandarlampung tidak mengalami perkembangan. Pada rasio kemandirian		

masih mengalami ketergantungan dan secar rata-rata trend mengalami perkembangan dalam upaya mengurangi ketergantungan.
Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal bahwa pemerintah kurang baik dalam menjalankan tanggung jawab dan juga secara trend telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam pemerintah kota Bandar Lampung belum memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya

Penelitian ini mengarah pada penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Ramadhani (2016) , dan Putri (2018) Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan daerah. Menurut Ramdhani (2016), dengan judul penelitian "ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DI KOTA TARAKAN TAHUN 2010-2015" dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif serta menggunakan variabel, rasio efektivitas, rasio kemandirian, trend efektivitas dan trend kemandirian. Dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa rasio efektivitas pada kota Tarakan tergolong dalam katagori efektiv artinya kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah memiliki kemampuan yang efektif. Sedangkan rasio kemandirian daerah, kota Tarakan memiliki tingkatan dalam kritera kemandirian daerah yang berada dalam katagori rendah sekali. Dimana kemandirian daerah kota Tarakan masih memiliki ketergantungan yang besar dalam dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Kemudian trend kemandirian dan trend efektivitas pada tahun 2016-2020 memiliki trend yang positif dan memiliki kecendrungan yang meningkat.

Menurut Putri (2018), dengan judul "ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS,KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI DAERAH MENURUT PRESEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017)". Dimana variabel yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah,rasio tingkat efektivitas,rasio desentralisasi keuangan daerah dan trend dari masing-masing rasio. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pada hasil penelitian, terlihat pada tahun 2017 Kota Bandar Lampung memiliki nilai rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 42,07 persen. Pada kriteria kinerja keuangan daerah, Kota Bandar Lampung masuk dalam kriteria rendah. Dimana kriteria rendah tersebut berada pada nilai rasio antara 25-50 persen. Sehingga Kota Bandar Lampung memiliki ketergantungan keuangan pada dana Transfer Pemerintah Pusat masih cukup tinggi (Putri, 2018). Namun dengan menggunakan trend kemandirian, dapat disimpulkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki perkembangan pada tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2017 sebesar 394,65 persen. Dimana ketika nilai trend lebih dari 100 persen, maka trend kemandirian keuangan daerah menunjukan arah perkembangan.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada perbedaan rasio yang digunakan, tempat penelitian dan waktu penelitian serta objek dari penelitian. Penelitian menggunakan kasus kinerja keuangan pada Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari rasio efektivitas,rasio kemandirian keuangan dan rasio desentralisasi keuangan daerah serta trend dari masing-masing rasio. Setelah didapatkan hasil maka

akan dilihat seberapa besar perubahan yang terjadi dalam kinerja keuangan Kabupaten Way Kanan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan batasan tertentu dalam kepentingan bagi daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. tujuan adanya otonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui sarana prasarana penunjangnya. Selain itu, tujuan adanya otonomi daerah adalah untuk mendorong terciptanya efesiensi dalam menggali sumber pendapatan daerah. Keberhasilan dari jalannya suatu otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya pengelolahan yang tepat dapat memberikan dampak yang baik bagi kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber yang menjadi potensial dalam menyumbang keuangan daerah.

2.2.2 Kinerja Keuangan Daerah

2.2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja dapat diartinya sebagai realisasi dari target yang dilakukan individu maupun instansi atau organisasi. Ketika sebuah kinerja dilakukan sesuai target maka individu atau organisasi tersebut memiliki kualitas kinerja yang baik. Namun, ketika sebuah kinerja yang dilakukan oleh individu atau organisasi kurang dari

target dari perencanaan,maka kinerja dari indivudu atau organisasi tersebut memiliki kualitas kinerja yang buruk.(Putri, 2018) Kinerja didefinisikan bahwa kinerja merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai hasil capaian dari jalannya program daerah dalam mecapai target dan tujuan Pemerintah.(Lubis & Hafni, 2017) dengan adanya otonomi daerah, bahwa Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pada daerahnya sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan memiliki transparansi kepada public. Khususnya masyarakat daerah. Karena peran masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam mengawasi jalanya pemerintah daerah

Analisis kinerja keuangan daerah dibutuhkan untuk melihat kinerja pemerintah daerah. Dimana analisis kinerja keuangan dilakukan pada kinerja keuangan yang telah terealisasi selama satu tahun. Atau sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dibutuhkan sebuah analisis terhadap pengukuran kinerja keuangan daerah.

2.2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran merupakan sebuah alat yaig digunakan sebagai untuk melihat tingkat efektivitas dari sebuah keputusan. Dalam konteks kinerja keuangan daerah pengukuran dibutuhkan untuk melihat apaja saya indicator yang ditetapkan dalam kinerja keuangan daerah. Sedangkan kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang diterima atas sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuann. Sehinga dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan sebuah kegiatan dalam

mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dengan hasil berupa output.(Lubis & Hafni, 2017)

2.2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan dari adanya pengukuran kinerja pada keuangan daerah adalah :

- Mengetahui pencapaian atas target Pemerintah Daerah.
- Sebagai landasan dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada periode selanjutnya.
- Sebagai sarana dalam memberika motivasi

2.2.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Kemudian dari adanya pengukuran kinerja keuangan daerah, terdapat juga manfaat yang timbul yaitu :

- Sebagai sarana dalam pengevaluasian kinerja keuangan daerah.
- Hasil dari kinerja tersebut dapat memberikan reward bagi daerah
- Sebagai sarana dalam memberikan pemahaman mengenai kinerja keuangan daerah.
- Dapat memberikan manfaat yang lain dalan proses komunikasi
- Sebagai sarana dalam memberikan pemahaman terhadap penyelenggaran pemerintah.
- Sebagai sarana dalam munculnya permasalahan yang terkait kinerja keuangan daerah.

2.2.3 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

2.2.3.1 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas (Selanjutnya disebut "EKD") merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk meihat sebagimana realisasi dari potensi-potensi suatu daerah dengan dibandingkan pendapatan dari target dari potensi-potensi daerah. Dimana realisasi dan target yang digunakan merupakan realisasi dan target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka adapun perhitungan yang digunakan dalam rasio efektivitas ialah:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui sejauh mana tingkat efetivitas dari realisasi dan target kemampuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memberikan kontribusinya terhadap daerah. Adapun penentuan terhadap katagori tingkat efektivitas sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1

Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Persentase (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup efektif	>80 – 90
Kurang efektif	> 60 – 80
Tidak efektif	≤ 60

Tabel 1.3, merupakan tabel kriteria mengenai efektivitas dari keuangan daerah dimana ketika nilai efektivitas yang dihasilkan dari rasio efektivitas memiliki nilai lebih dari 100 persen maka berada dalam katagori sangat efektif dimana realisasi pemerintah daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan otonomi daerah memang benar telah dikelolah dan dilaksanakan secara efektif. Kemudian ketika nilai dari rasio efektivitas berada pada nilai kurang dari 60 persen maka realisasi otonomi daerah belum dapat dijalakan secara efeektiv oleh pemerintah daerah.

Kemudian metode yang digunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan yang terjadi terhadap tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah mengunakan trend secara presentase. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014), menggunakan metode trend untuk meihat sebesar besar kontribusi rasio efektivitas terhadap perkembangan dari efektivitas keuangan daerah. Ketika nilai dari trend efektivitas menunjukan nila lebih dari 100 persen

maka terdapat perkembangan yang terajadi pada perkembanagan pada efektivitas keuangan daerah. Namun jika nilai dari trend efektivitas keuangan daerah menunjukan nilai kurang dari 100 persen maka pada tingkat efektivitas keuangan daerah tidak terdapat perkembangan. Dalam penelitian ini yang menjadi tahun dasar pada tingkat trend efektivitas keuangan daerah pada tahun 2010. Dan untuk menghitung trend dalam presentasi penelitian tersebut menggunakan salah satu tahun dalam penelitian sebagai tahun dasar. Adapun perhitungan trend dalm presentase sebagai berikut :

$$\text{Trend efektivitas} = \frac{\text{EKD tahun pembanding}}{\text{EKD tahun Dasar}} \times 100\ \%$$

2.2.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (selanjutnya disebut "KKD") Daerah merupakan suatu pengimplementasian dari terwujudnya otonomi daerah. Dimana kemandirian daerah merupakan kemampuan dari satu daerah dalam melakukan pembiayaan terhadap tujuan dan target pemerintah seperti menciptakan pelayanan public, meningkatan sarana prasarana yang menunjang pendidikan dan kesehatan yang didapatkan dari hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.(Pramono, 2014) Kemudian, rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukan dengan angka dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana transfer dari Peremerintah Pusat. Sehingga dapat di tentukan dengan menggunakan perhitungan rasio sebagai berikut :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Berikut tabel yang menentukan kriteria kemandirian keuangan suatu daerah

Tabel 2.2.3.2

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	**persentase**	**Pola Hubungan**
Rendah sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
tinggi	75%-100%	delegatif

Pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwa ketika rasio kemandirian keuangan daerah memiliki nilai 0-25 % maka dapat diatagorikan bahwa tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berada pada kemampuan yang rendah sekali dan memiliki pola hubungan yang instruktif. Kemudian ketika rasio kemandirian keuangan suatu daerah menunjukan nilai 75-100 % maka dapat dikatagorikan bahwa tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tersebut berada kemampuan yang tinggi dan memiliki pola yang delegatif.

Kemudian untuk melihat kecendrungan dari perkembangan kemandirian keuangan suatu daerah maka digunakan analisis trend. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) mengatakan, bahwa penggguna trend secara presentase dapat digunakan sebagai perhitungan dalam melihat arah perkembangan dari sebuah institusi ataupun organisasi. Dalam penggunaan metode trend secara presentase digunakan satu tahun sebagai tahun dasar. Ketika dalam tahun tersebut ditentukan sebagai tahun dasar maka data tersebut dikalikan dengan 100 persen.

Penggunaan trend dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah untuk melihat apakah ada perkembangan dari kemandirian keuangan daerah yang dilakukan penelitian. Ketika persentase dari trend memiliki nilai kurang dari 100 persen maka pada daerah tersebut tidak terjadi perkembangan terhadap kemandirian keuangan daerahnya. Namun ketika tpresentase trend menunjukan nilai lebih dari 100 % maka didaerah tersebut terjadi perkembangan terhadap kemandirian keuangan daerahnya. Pada penelitian ini menggunakan tahun dasar adalah tahun 2010 Adapun perhitungan dari trend secara persentase sebagai berikut :

$$\text{Trend kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{KKD tahun pembanding}}{\text{KKD tahun dasar}} \times 100\ \%$$

2.2.3.3 Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio Desentralisas (Selanjutnya disebut “DKD”) Keuangan Daerah merupakan sebuah pertanggung jawaban peemerinta daerag terhadap otonomi daerah. Dimana dengan adanya otonomi maka suatu daerah memiliki tanggung jawab atas daerahnya. (Putri, 2018) kemudian dalam define lain , mengatakan bahwa Rasio desentralisasi keuangan daerah merupakan sebuah kemampuan yan dimiliki daerah yang benar asli dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika kontribusi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi terhadap daerah maka tingkat kemampuan suatu daerah terhadap desentralisainya juga tinggi. (Rante, Mire, & Paminto, 2018) Adapun perhitungan rasio Desentralisasi Keuangan Daerah sebagai berikut :

$$\text{Rasio desentralisasi} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka terdapat kriteria dari Desentralisasi Keuangan suatu daerah,sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.3

Kriteria Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Desentralisasi (%)
Sangat kurang	0-10 %
Kurang	10,1-20 %
Sedang	20,1-30%
Cukup	30,1-40%
Baik	40,1-50%
Sangat baik	>50%

Pada tabel 1.5, dapat dilihat bahwa tabel tersebut merupakan kriteria dari desentralisasi keuangan suatu daerah. Dimana ketika nilai dari rasio desentralisai keuangan suatu daerah antara 0-10 persen maka dalam daerah tersebut masih memiliki kemampuan desentralisasi keuangan yang sangat kurang. Namun ketika nilai rasio desentralisasi keuangan daerah lebih dari 50 persen maka desentralisasi pada daerah tersebut masuk dalam katagori sangat baik.

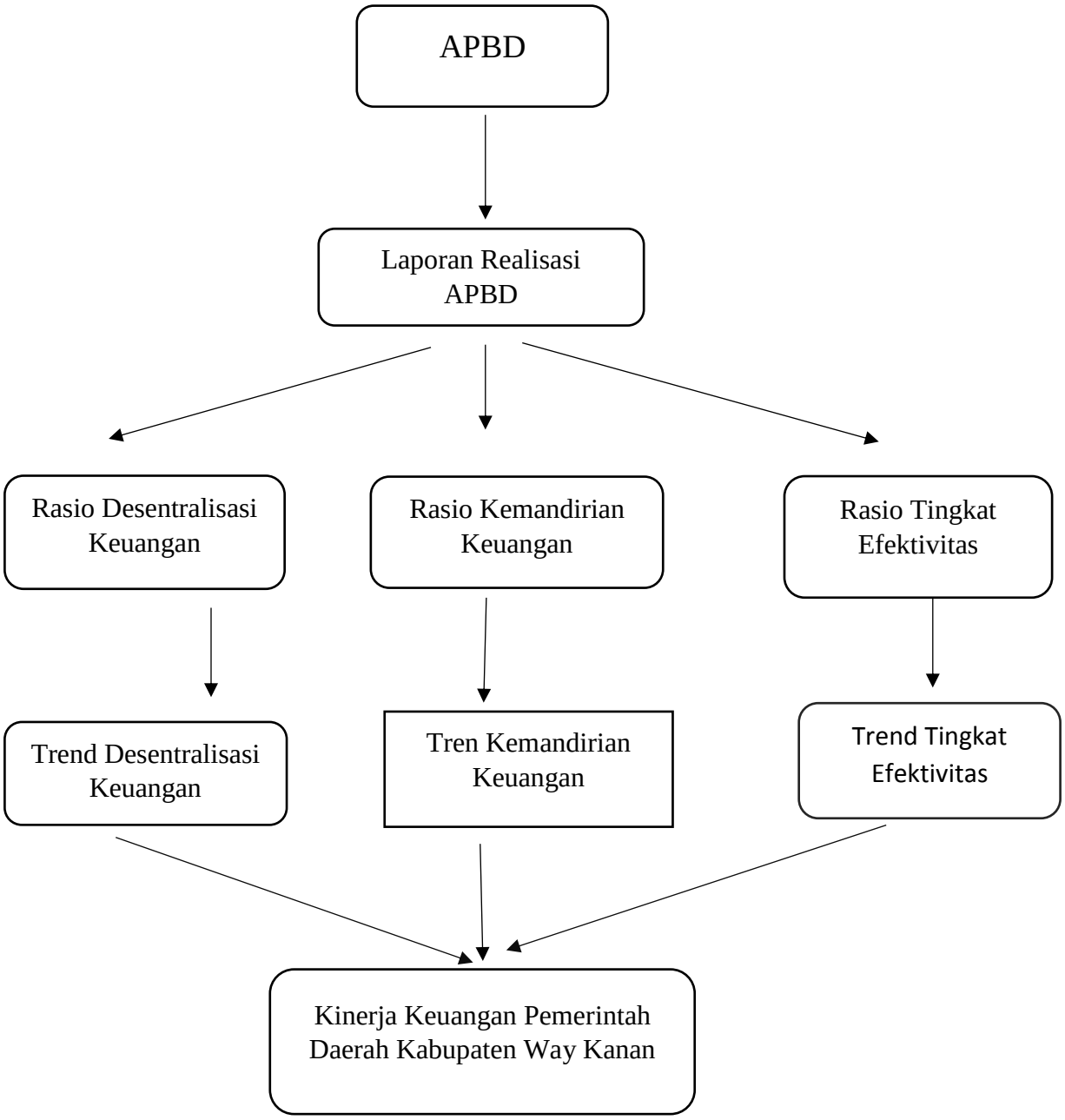
Kemudian terdapat metode yang dapat melihat jalanya perkembangan dari desentralisai keuangan suatu daerah. Dimana metode tersebut ialah metode trend secara persen. Metode ini sering digunakan untuk melihat perkembangan yang terjadi pada laporan keuangan. Pada metode ini digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar.

Dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar pada tahun 2010. Adapun perhitungan yang digunakan dalam trend pada presentase, sebagai berikut :

$$\text{Tren desentralisasi keuangan} = \frac{\text{DKD tahun pembanding}}{\text{DKD tahun dasar}} \times 100\ \%$$

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2016), mengatakan bahwa kerangka berfikir merupakan sebuah kaitan antara teori dengan berbagai permasalahan yang telah ditelaah sehingga dianggap penting sebagai objek dalam sebuah penelitian. Kerangaka berfikir yang seharusnya digunakan adalah kerangka berfikir yang memiliki kaitan dengan variable dalam penelitian. Yang dapat dijelaskan secara teoritis sehingga memiliki landasan dalam penggunaannya. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah gambaran dari pengelolahan dan pelaksanaan dari suat daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan sebuah cerminan bagi suatu daerah terhadap berbagai macam program yang hendak dilakukan dengan berdasarkan kebijakan-kebijakan selama kurun wakt 1 tahun. (Adisasmita, 2014) sehinga dengan adanya APBD akan terbentuknya sebuah realisasi dari jalannya perencanaan selama 1 tahun. Kemudian realisasi tersebut tertuangan dalam Laporan Realisasi Keuangan. Kemudian untuk menganalisis bagaimana hasil yang dapat diperoleh dari Laporan Realisasi APBD maka digunakan analisis terhadap kinerja keuangan daerah. Dimana dengan menganalisis kinerja keuangan suatu daerah menggunakan rasio efektivitas,rasio kemandirian keuangan daerah ,desentralisasi keuangan daerah serta trend untuk melihat bagaimana perkembangan dari rasio yang digunakan dalam penelitian.

Ketika semakin tinggi rasio efektivitas maka akan menggambarkan keadaan suatu daerah lebih baik. Sehinga dengan semakin efektiv nya suatu keuangan daerah yang berasal dari realisasi pendapatan asli daerah dan target pendapatan asli daerah maka akan menurunkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kemudian ketika rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan peningkatan maka maka menurunkan tingkat transfer Pemerintah Pusat kepada Pemeritah daerah. Sehingga pada tahap ini Pemerintah Daerah sudah mampu untuk membiayi daerahnya sendiri. Kemudia rasio desentralisasi menggambarkan

kemampuan daerah dalam penggolalahan potensi daerah yang berimplikasi kepada tambahan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Sehingga dengan menganalisis dengan menggunakan rasio-rasio tersebut akan mudah bagaimana dalam menggambarkan kinerja keuangan suatu daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2017. Data tersebut di peroleh melalui Dinas Pengelolahan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi dan dokumen yang dapat mendukung penelitian. Pengumpulan dokumen tersebut seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskripif. Dimana metode analisis deskriptif menggunakan sebuah teknik dengan menganalisis data kemudian di inepretasikan dengan cara di deskripsikan sehingga dapat mudah dipahami. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio yang terbagi menjadi

tiga variable yaitu : rasio efektivitas , rasio kemandirian keuangan daerah,rasio desentralisasi keuangan daerah dan trend dari masing-masing rasio.

3.4.1 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (Selanjutnya disebut "EKD") merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk meihat sebagimana realisasi dari potensi-potensi suatu daerah dengan dibandingkan pendapatan dari target dari potensi-potensi daerah. Dimana realisasi dan target yang digunakan merupakan realisasi dan target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka adapun perhitungan yang digunakan dalam rasio efektivitas ialah:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\ \%$$

Kemudian metode yang digunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan yang terjadi terhadap tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah mengunakan trend secara presentase. Ketika nilai dari trend efektivitas menunjukan nila lebih dari 100 persen maka terdapat perkembangan yang terajadi pada perkembanagan pada efektivitas keuangan daerah. Namun jika nilai dari trend efektivitas keuangan daerah menunjukan nilai kurang dari 100 persen maka pada tingkat efektivitas keuangan daerah tidak terdapat perkembangan. . Dan untuk menghitung trend dalam presentasi penelitian tersebut menggunakan salah satu tahun dalam penelitian sebagai tahun dasar. Adapun perhitungan trend dalm presentase sebagai berikut :

$$\text{Trend efektivitas} = \frac{\text{EKD tahun pembanding}}{\text{EKD tahun Dasar}} \times 100\ \%$$

3.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam menggali sumber potensinya untuk membiayai keperluan daerah. Sehingga dapat di tentukan dengan menggunakan perhitungan rasio sebagai berikut :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Kemudian untuk melihat kecendrungan dari perkembangan arah dari kemandirian keuangan suatu daerah maka digunakan analisis trend. Dalam penggunaan metode trend secara presentase digunakan satu tahun sebagai tahun dasar. Ketika dalam tahun tersebut ditentukan sebagai tahun dasar maka data tersebut dikalikan dengan 100 persen.

Penggunaan trend dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah untuk melihat apakah ada perkembangan dari kemandirian keuangan daerah yang dilakukan penelitian. Ketika persentase dari trend memiliki nilai kurang dari 100 persen maka pada daerah tersebut tidak terjadi perkembangan terhadap kemandirian keuangan daerahnya. Namun ketika tpresentase trend menunjukan nilai lebih dari 100 % maka didaerah tersebut terjadi perkembangan terhadap kemandirian keuangan daerahnya. Pada penelitian ini menggunakan tahun dasar adalah tahun 2010 Adapun perhitungan dari trend secara persentase sebagai berikut :

$$\text{Trend kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{KKD tahun pemanding}}{\text{KKD tahun dasar}} \times 100\ \%$$

3.4.3 Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio Desentralisas keuangan daerah merupakan sebuah rasio yang digunakakn untuk melihat seberapa besar tanggung jawab pemerintah daerah terhadap otonomi daerah. Adapun perhitungan rasio Desentralisasi Keuangan Daerah sebagai berikut :

$$\text{Rasio desentralisasi} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\ \%$$

Kemudian terdapat metode yang dapat melihat jalanya perkembangan dari desentralisai keungan suatu daerah. Pada metode ini digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Adapun perhitungan yang digunakan dalam trend pada presentase, sebagai berikut :

$$\text{Tren desentralisasi keuangan} = \frac{\text{DKD tahun pembanding}}{\text{DKD tahun dasar}} \times 100\ \%$$

3.5 Definisi Operasional Variabel

Ukuran dari kemampuan daerah yang merupakan tanggung jawab daerah terhadap daerahnya dapat dilihat melalui kinerja keuangan daerahnya. Sehingga penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan daerah menggunakan variable seperti

rasio kemandirian keuangan derah, rasio efektivitas,rasio desentralisasi fiscal serta trend dari masing-masing rasio.

Tabel 3.5

Definisi Operasional Variabel

variabel	ukuran
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan keuangan dari suatu daerah untuk membiayi daerahnya. Dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan public melalui sumber-sumber yang menjadi pendapatan.(Adisasmita, 2014)	Rasio kemandirian = PAD / Dana Perimbangan x 100%
Trend kemandirian keuangan daerah digunakan untuk melihat perkembangan yang terjadi berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah.	Trend kemandirian keuangan daerah = efektivitas tahun pembanding / Tahun Dasar x 100%
Rasio efektivitas merupakan gambaran dari sebuah Pemerintah daerah terahadap realisasi dan target yang hendak hendak dituju.(Mahardika & Artini, 2011)	Rasio efektivitas = Realisasi PAD / Target PAD x 100%
Trend efektivitas digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan berdasarkan rasio efektivitas	Trend Efektivitas efektivitas tahun pembanding / Tahun Dasar x 100%

Rasio desentralisasi keuangan daerah merupakan cerminan kontribusi secara asli dari Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah	Rasio Desentralisasi = Total Pendapatan Asli Daerah / Total pendapatan Daerah x 100 %
Trend desentralisasi keuangan daerah digunakan untuk melihat perkembangan yang terjadi pada rasio desentralisasi keuangan daerah	Trend Desentralisasi = efektivitas tahun pembanding / Tahun Dasar x 100%

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah

4.1.1 Geografis Kabupaten Way Kanan

Kabu paten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan luas daerah sebesar 3.921,63 km ². Atau Kabupaten Way Kanan memiliki total luas sebsar 11.11 persen dari Provinsi Lampung. Sejak tahun 1999 setelah disahkannya Kecamatan Blambangan Umpu sebagai ibukota,hingga saat ini tidak terjadi perubahan terhadap ibukota Kabupaten Way Kanan. adapun keadaan geografis berdasarkan wilayah administratif wilayah yang berbatasan disekitar Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Pada sebelah utara, Kabupaten Way Kanan berbatas dengan Provinsi Sumatera Selatan
2. Pada sebelah selatan, Kabupaten Way Kanan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
3. Pada sebelah timur, Kabupaten Way Kanan berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang
4. Pada Sebelah Barat, Kabupaten Way Kanan beberbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.(Way Kanan, 2018)

4.1.2 Topografis Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan memiliki Toppografi yang dibedakan menjadi dua yaitu, topografis bukitan dan gunung dan juga river basin. Topografi bukitan dan gunung terdiri dari lereng-lereng yang ketinginya mulai dari 450-1500 meter dipermukaa laut. Adapun bukitan yang berada pada Kabupaten Way Kanan adalh Bukit Barisan.

4.1.3 Sejarah Pembentukan Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan diawali tahun 1957, Kepeimpinan pertama oleh Wedana Way Kanan dan Ratu Pengadilan. Kemudian terjadilah pertemuan untuk pertama kalinya guna terbentuknya Kabupaten Way Kanan agar dapat disahkan menjadi sebuah daerah. Pada pertemuan tersebut, membahas mengenai tanah yang dibutuhkan sebesar 100.000 hektar untuk tempat translamigrasi. Namun,yang terjadi pasa saat itu terjadi penolak oleh beberapa Kabupaten yang ada disekitar Kabupaten Way Kanan.

Pada saat itu muncul pemikiran baru oleh Hi. Ridwan Basah mengenai pembentukan Kabupaten Way Kanan agar dapat menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri. Hal tersebut kemudian di bahas kembali pada tahun 1971 dan dilakukan pertemuan antara tokoh adat dan orang-orang yang berpengaruh diKabupaten Way Kanan. Kabupaten Way Kanan yang masih memegang teguh adat istiadat sehingga

pada tahun 1975 salah seorang tokoh melaksanakan agar adat yaitu Begawi. Pada saat itulah baru ada pemikiran untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait dengan keinginan agar dapat Kabupaten Way Kanan menjadi Kabupaten yang terpisah atau berdiri sendiri**.**

Setelah itu disetujui oleh Pemerintah Daerah Tingkat satu, terebentuk lah kepala daerah pembantu untuk Kabupaten Way Kanan. betdasarkan keputusan Mentri Dalam Negeri,Nomor : 821.26-502 pada tanggal 8 Juni 1985. Dimana pembantu kepala daerah dari Kabupaten Lampung Utara. Maka Kabupaten Way Kanan terdiri menjadi 6 wilayah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Blambangan Umpu dengan ibukota Blambangan Umpu
2. Kecamatan Bahuga dengan ibukota Mesir ilir
3. Kecamatan Pakuan Ratu dengan ibukota Pakuan Ratu
4. Kecamatan Baradatu dengan ibukota Tiuh Balak
5. Kecamatan Bancit dengan ibukota Banjit
6. Kecamatan Kasui dengan ibukota Kasui.

Barulah pada saat tahun 1991 terbentuknya Pembantu Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan untuk pertama kalinya. Berdasarkan keputusan surat edaran Badan Perencanaa dan Pembangunan Daerah (Beppeda) Provinsi Lampung, Nomor 660/1990/11/1991. Kemudian setelah itu, terjadi pertemuan kembali untuk pembahasa mengenai persiapaan Kabupaten Way Kanan untuk disahkan menjadi Kabupaten yang

berdiri sendiri. Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 1999 Pada tanggal 20 April 1997 kabupaten Way Kanan resmi dinyatakan sebagai Kabupaten.

4.1.4 Hari Jadi Kabupaten Way Kanan

Maka ditetapkan lah hari jadi Kabupaten Way Kanan pada tanggal 27 April 1999. Dengan ibuota Blambangan Umpu. Kemudian pemeilihan Kecamatan Blambangan Umpu menjadi ibu dengan beberapa hasil pertimbangan,yaitu :

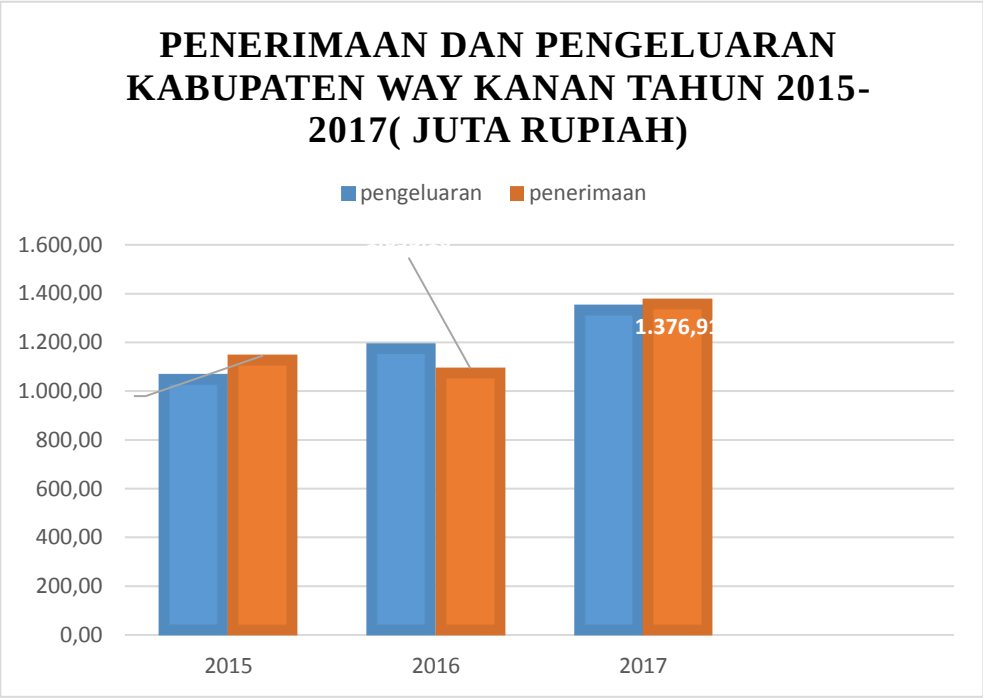
1. Tempat yang strategi dimana Kecamatan BlambanganUmpu berada di tengah wilayah Kabupaten Way Kanan sehingga memiliki akses yang mudah untuk terhubung dengan Kecamatan lainnya.
2. Blambangan Umpu merupakan Kecamatan yang strategis terhadap akses transportasi yang menghubungkan dengan Kabupaten/kota lainnya.(Way Kanan, 2018)

4.1.5 Keadaan Keuangan Kabupaten Way Kanan

Keadaan keuangan di Kabupaten Way Kanan tercerminkan dalam tingkat Pengeluaran dan Pendapatan daerah adapun Realisasi dari Penerimaan dan pengeluaran Kabupaten Way Kanan tahun selama tahun 2015-2017, sebagai berikut :

Grafik 4.1.5

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017



Dapat dilihat, berdasarkan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran Kabupaten Way Kanan pada tahun 2015 - 2017 . bahwa setiap tahun pada grafik penerimaan daerah mengalami pergerakan fluktuatif. Pada tahun 2015 nilai penerimaan Kabupaten Way Kanan sebesar 1.146, 87 juta rupiah. Namun tampak pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 1.093,16 juta rupiah dan kemudian pada tahun 2017 terjadi kenaikan kembali pada penerimaan Kabupaten Way Kanan sebesar 1.351,72 juta rupiah. Sedangkan pada sisi pengeluaran daerah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, pengeluaran Kabupaten Way Kanan sebesar 1.068,87 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2016 pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten

Way Kanan mengalami peningkatan sebesar 1.194,26 juta rupiah hingga pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan pengeluaran mencapai 1. 351,72 juta rupiah. Sehinga dengan hal ini,dapat menunjukan keadaan keuangan Kabupaten Way Kanan tahun 2015-2017.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Rasio Keuangan

4.2.1.1 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur sebesar besar kemampuan keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Dimana rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 pada tabel 4.2.1.1**:**

Tabel 4.2.1.1

Rasio Eektivitas dan Trend Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	RASIO EFEKTIVITAS (%)	TREND EFEKTIVITAS (%)
2010	9.863.200.000,00	8.745.820.446,48	88,67	100
2011	11.690.998.000,00	9.472.086.717,93	81,02	91
2012	13.591.500.000,00	10.148.122.569,52	74,67	84
2013	23.463.500.000,00	24.831.167.985,13	105,83	119
2014	39.634.640.000,00	45.811.422.786,00	115,58	130
2015	40.314.672.842,00	47.894.065.832,87	118,80	134
2016	42.251.763.337,21	37.271.665.575,84	88,21	99
2017	49.956.156.849,00	49.538.197.652,98	99,16	112
rata-rata	28.845.803.878,53	29.214.068.695,84	96,49	109

Berdasarkan tabel 4.2.1.1,rasio efektivitas pada tahun 2010 sebesar 88,67. Dimana pada kriteria efektivitas keuangan daerah, kinerja keuangan Kabupaten Way Kanan masuk dalam katagori cukup efektif. Tetapi pada tahun 2011 kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan menurun,sehingga rasio efektivitas pada Tahun 2009 turun menjadi 81,02 persen. Tetapi pada tahap ini kinerja keuangan daerah Kabupaten Way Kanan masih dalam kriteria efektivitas yang cukup efektif. Kemudian kemampuan dalam pengelolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan terus menurun hingga Tahun 2012. Penurunan tersebut, berdampak pada rasio efektivitas yang turun menjadi 74,67 persen. Dimana pada

keadaan tersebut, kinerja keuangan daerah masuk dalam kriteria efektivitas kurang efektif.

Kemudian pada tahun 2013-2015 kinerja keuangan daerah Kabupaten Way Kanan, mengalami perbaikan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berdampak pada kenaikan hingga mencapai nilai 118,80 persen. Dalam kriteria efektivitas keuangan daerah Kabupaten Way Kanan memiliki kriteria sangat efektif. Penurunan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahum 2006, ditunjukan dengan penurunan nilai rasio yang turun menjadi 88,21 persen. Tetapi pada tahun 2017, Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dalam kemampuan keuangannya yang dapat dilihat melalui nilai rasio efektivitas sebesar 99,16 persen. Dalam keadaan tersebut, pada tahun 2017, Kabupaten Way Kanan memiliki kriteria efektivitas keuangan daerah pada tingkat efektif. Secara rata – rata, rasio efektivitas keuangan daerah, Kabupaten Way Kanan memiliki nilai sebesar 96,49 persen. Dimana pada keadaan tersebut, Kabupaten Way Kanan memiliki tingkat efektifivitas keuangan daerah berdasarkan kriteria efektivitas masuk katagori efektif. Berikut grafik rasio efektivitas kinerja keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017 :

Grafik 4.2.1.2

Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017



Pada grafik 4.2.1.2, menjelaskan bahwa rasio efektivitas kinerja keuangan Pemrintah Daerah Way Kanan sangat fluktuatif. Secara rata-rata bahwa rasio efektivitas tahun 2010-2017 di Kabupaten Way Kanan memiliki nilai sebesar 96,49 persen. Sehingga berdasarkan table kinerja keuangan daerah, bahwa Kabupaten Way Kanan masuk dalam katagori efektif. Kemudian untuk melihat perkembangan efektivitas kinerja keuangan daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2017, dapat dilihat melalui metode Trend. Sedangakan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Trend digunakan untuk melihat perkembangan dari efektivitas kinerjan keuangan di Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan grafik, maka dapat dilihat bahwa

pada tahun 2013-2015 trend pada efektivitas kinerja keuangan daerah Way Kanan memiliki nilai di atas 100 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut, terdapat perkembangan terhadap efektivitas kinerja keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan. Namun pada tahun 2016, trend terhadap efektivitas kinerja keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan sebesar 99 persen. sehingga dapat dikatakann belum terdapatnya perkembangan efektivitas kinerja keuangan di Kabupaten Way Kanan. Namun pada Tahun 2017, kinerja dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan mengalami kenaikan yang ditunjukan dengan kenaikan nilai trend efektivitas keuangan sebesar 112 persen. Pada keadaaan tersebut, menunjukan adanya perkembangan terhadap efektivitas keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2017. Secara keseluruhan, pada tahun 2010-2017 secara rata-rata trend tehadap efektivitas kinerja keuangan daerah sebesar 109 persen . sehingga jika nilai trend lebih dari 100 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perkembangan terhadap Efektivitas Kinerja Keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan.

4.2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan sebuah perhitungan yang digunakan dalam mengukur tingkah kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Rasio kemandirian, diperoleh dengan perbandingan antara kemampuan suatu daerah dalam menghasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat atau yang disebut Dana Perimbangan. Berikut Rasio

Kemanidirian Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017 pada tabel 4.2.1.2 :

Tabel 4.2.1.2

Rasio dan Trend Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN	RASIO KEMANDIRIAN (%)	TREND KEMANDIRIAN (%)
2010	8.745.820.446,48	408.205.931.484,00	2,14	100
2011	9.472.086.717,93	475.517.323.333,00	1,99	93
2012	10.148.122.569,52	579.328.013.519,00	1,75	82
2013	24.831.167.985,13	651.613.183.342,00	3,81	178
2014	45.811.422.786,00	701.026.300.811	6,53	305
2015	47.894.065.832,87	780.633.656.977,00	6,14	287
2016	37.271.665.575,84	908.456.210.688,00	4,1	192
2017	49.538.197.652,98	1.034.484.642.816,00	4,79	224
rata-rata	29.214.068.695,84	692.408.157.871,25	3,91	183

Berdasarkan tabel 4.2.1.2, dapat dilihat bahwa rasio kemandirian Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2010, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan menunjukan rasio sebesar 2,14 persen. Pada keadaan tersebut, mengarah pada kriteria kemandirian keuangan daerah pada pola hubungan yang instruktif. Dimana dalam keadaan itu, kemampuan kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali. Kemudian pada tahun 2011 menunjukan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan yang terus

mengalami penurunan hingga 1,99 persen. Sehingga berdasarkan kriteria kemandirian keuangan daerah, Kabupaten Way Kanan masih berada pada katagori pola hubungan yang instruktif atau berdasarkan kemampuan daerah masih dalam katagori rendah sekali.

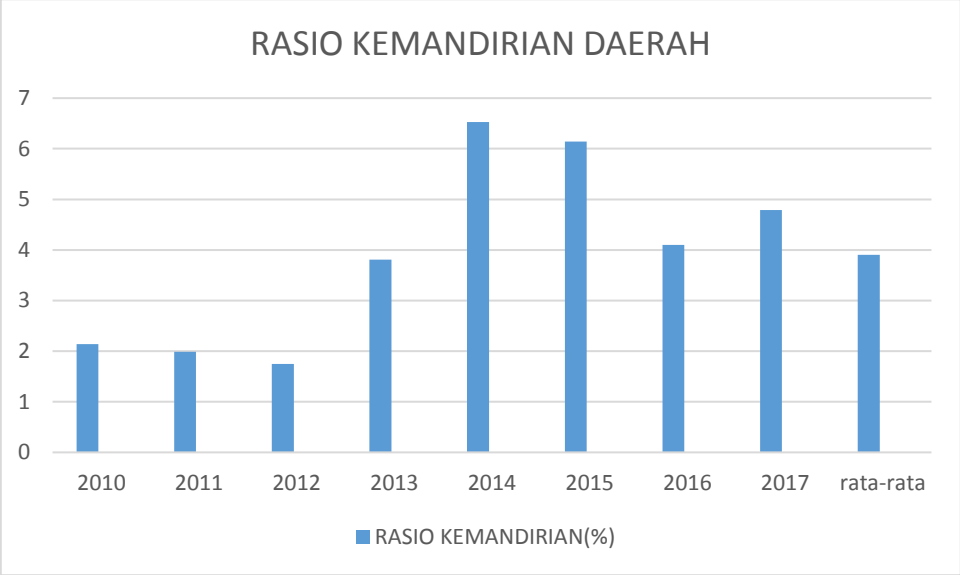
Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan selama rentang waktu 2010-2017 terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 1,75 persen. Pada keadaan tersebut, dapat dinayatakan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah sekali. Tetapi, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan hingga 6,53 persen. Namun masih memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah dan ditunjukan dengan pola hubungan yang instruktif. Kemudian pada tahun 2015-2016, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan menunjukan penurunan hingga 4,1 persen dimana pada keadaan tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Way Kanan memilii tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali dan membentukan pola hubungan yang instruktif.

Pada tahun 2017, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan memiliki nilai rasio sebesar 4, 79 persen. Dalam keadaan tersebut, menunjukan kemampuan kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali dan dengan pola hubungan yang instruktif. Secara rata-rata maka kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2010-2017 memiliki rasio kemandirian sebesar 3,91 persen. Berdasarkan kriteria kemandirian keuangan daerahmenunjukan hubungan

yang instruktif dan memiliki kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali. Berikut grafik rasio dan trend kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017 :

Grafik 1.2.1.2

Rasio Kemandirian Keuangan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017



Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan sebesar 3,91 persen. dimana pada rasio tersebut, nenunjukan kemampuan kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali dan mmeiliki pola hubungan yang instruktif. Kemudian untuk melihat perkembang kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan maka dengan menggunakan trend. Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa trend kemandirian pada tahun 2010 sebesar 100 persen. Dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Kabaputan

Way Kanan memiliki perkembangan dalam kemandirian keuangan daerah. Tetapi pada tahun 2011-2012, rasio kemandirian keuangan menujukan penurun hingga 82 persen. Sehingga pada saat itu, tidak terjadinya perkembangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kenaikan tertingi pada trend kemandirian keuangan terjadi pada tahun 2014 sebesar 305 persen. Dalam hal ini, Kabupaten Way Kanan memiliki perkembangan dalam kemandirian keuangan daerah.

Pada tahun 2015-2017 memiliki trend kemandirian keuangan daerah hingga 224 walaupun terjadi penurunan, tetapi Kabupaten Way Kanan mempu mengatasinya dengan memperbaiki kemandirian keuangan daerah pada tahun selanjutnya. Yang menunjukan adanya perkembangan kemandirian daerah Kabupaten Way Kanan. Jika dilihat berdasarkan nilai rata-rata pada tahun 2010-2017 dari perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan sebesar 183 persen. ketika nilai trend diatas 100 persen, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Way Kanan mengalami perkembangan terhadap Kemampuan keuangan daerah.

4.2.1.3 Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio desentralisasi keuangan daerah merupakan sebuah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melakukan pelaksanaan otonomi daerah melalui kemampuan dalam mengelolah sumber-sumber yang menjadi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio desentralisasi keuangan diperoleh dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total

pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Berikut rasio dan trend desentralisasi keuangan daerah dalam tabel 4.2.1.3 :

Tabel 4.2.1.3

Rasio dan Trend Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017

TAHUN	PAD	PENDAPATAN	RASIO DESENTRALISASI (%)	TREND DESENTRALISASI (%)
2010	8.745.820.446,48	479.038.907.939,48	1,83	23
2011	9.472.086.717,93	619.038.713.789,51	1,53	19
2012	10.148.122.569,52	696.739.560.610,78	1,46	18
2013	24.831.167.985,13	778.381.331.704,53	3,19	39
2014	45.811.422.786,00	871.294.716.363	5,26	65
2015	47.894.065.832,87	1.050.166.803.282	4,56	56
2016	37.271.665.575,84	1.157.764.082.244,84	3,22	40
2017	49.538.197.652,98	1.340.642.424.059,86	3,70	46
rata-rata	29.214.068.695,84	874.133.317.499,22	3,09	38

Berdasarkan tabel 4.2.2.3 , dapat dilihat bahwa tingkat rasio desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010 sebesar 1,83 persen. Dimana dengan rasio tersebut, menunjukan kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan berada pada katagori sangat kurang. Kemudian pada tahun 2011-2012rasio desentralisasi fiscal terus menurun hingga 1,46 persen. Dalam keadaan tersebut, menunjukan kemampuan desentralisasi keuangan yang masih sangat kurang.

Pada tahun 2013, terjadi kenaikan pada rasio desentralisasi fiscal keuangan daerah Kabupaten Way Kanan. dimana pada keadaan tersebut Kabupaten Way Kanan masih berada dalam tahap yang sangat kurang . kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,26 persen. Walaupun memiliki nilai rasio tertinggi dibandingakn tahun lain, tetapi masih dalam kemampuan desentralisasi keuangangan yang sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2015, nilai rasio desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan sebesar 4,56 persen. Diikuti pada tahun 2016 yang memiliki rasio desentralisai keuangan daerah sebesar 3,22 persen yang masih dalam kemampuan desentralisasi keuangan yang sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2017, rasio desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan sebesar 3,7 persen. Yang memiliki kemampuan desentralisasi keuangan masih dalam tahap sangat kurang. Berikut grafik rasio desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017

Grafik 4.2.1.3.

Rasio Desentralisasi fiskal Keuangan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2017



Berdasarkan grafik 4.2.1.3, dapat diketahui bahwa rasio desentralisasi keuangan di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2010-2017 masih termasuk dalam katagori sangat rendah. Dapat dilihat melalui nilai rata-rata rasio desentralisasi fiscal daerah Kabupaten Way Kanan hanya sebesar 3,09 persen. Sehingga kemampuan desentralisasi keuangan daerah, Kabupaten Way Kanan masuk dalam tahap sangat rendah.

Kemudian untuk melihat perkembangan desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat melalui trend Desentralisasi Keuangan. Pada tahun 2010, tingkat trend desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan sebesar 23 persen. Pada keadaan tersebut tidak menunjukan adanya perkembangan

pada desentralisasi keuangan daerah. Kemudian trend desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2011, yaitu sebesar 19 persen. dimana pada nilai tersebut, masih belum terjadi perkembangan pada desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan. nilai desentralisai keuangan daerah yang trendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 18 persen. Yang mana belum ada perkembangan terhadap desentralisasi keuangan daerah. Setelah itu, terjadi kenaikan trend desentralisasi keuangan daerah kabupaten Way Kanan pada tahun 2013 sebesar 39 persen. Tetapi belum ada perkembangan terhadap desentralisasi keuangan daerah.

Dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 65 persen. Namun dalam keadaan tersebut, Kabupaten Way Kanan belum memiliki perkembangan pada desentralisasi keuangan daerahnya. Hingga pada tahun 2015-2017, Kabupaten Way Kanan belum meiliki perkembangan erhadap desentralisasi keuangan daerah. Walaupun sempat ada kenaikan pada tahun 2015 dan turun kembali pada tahun selanjutnya. Jika dilihat berdasarkan nilai rata-rata sebesar 38 persen. maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Way Kanan belum terjadi perkembangan pada segi desentralisasi keuangan daerahnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui keadaan kinerja keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017. Dengan berbagai jenis rasio yang digunakan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

   Rasio efektivitas pada keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tampak pada tahun 2010-2012 rasio efektivitas menunjukan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan memiliki kinerja keuangan dalam keadaan yang cukup efektif. Kemudian pada tahun 2013-2015 kinerja keuangan daerah Kabupaten Way Kanan menunjukan keuangan daerah yang sangat efektif. Namun pada tahun 2016-2017 menunjukan kinerja keuangan yang kembali menurun menjadi keadaan yang cukup efektif kembali. Kemudian diikuti dengan trend efektivitas secara rata-rata menunjukan nilai sebesar 109 persen yang dimana keadaan tersebut, menggambarkan bahwa keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki perkembangan jika dilihat secara rata-rata .

2. Rasio Kemandirian

   Rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017 mengalami pergerakan yang fluktuatif.

Dimana pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan hingga pada tahun 2013-2015 mengalami kenaikan kembali. Tetapi kenaikan tersebut, masih dalam rasio kemandiran keuangan daerah dalam keadaan yang rendah sekali dan menunjukan pola yang instruktif. Kemudian pada pergantian kepemimpinan 2016-2017, keadaan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan menunjukan nilai yang turun dari tahun sebelumnya. Dan secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan menunjukan nilai sebesar 3,91 persen. dimana keadaan tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki kemampuan yang rendah sekali dalam kemandirian keuangan. Secara nyata, bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar dalam mendanai kebutuhan Kabupaten Way Kanan. didukung dengan trend kemandirian keuangan, bahwa keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010-2017, belum menunjukan perkembangan pada kemandirian keuangannya.

3. Rasio Desentralisasi Keuangan

Rasio desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2017 menunjukan keadaan tidak mengalami peningkatan. Kemampuan yang rendah dalam pengelolahan pendapatan asli daerah daerah (PAD) disinyalir menjadikan rasio desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan sangat rendah. Hal ini ditunjukan dengan nilai rata-rata dari rasio desentralisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan hanya

sebesar 3,09 persen. dimana pada keadaan tersebut menggambarkan kemampuan desentralisasi keungan yang sangat rendah hingga trend desentralisasi keuangan daerah juga tidak mengalami perkembangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah didapatkan serta informasi yang mendukung, maka peneliti hendak memberikan saran yang terkait permasalahan yang muncul dari hasil penelitian. Adapun saran tersebut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan

   Kemampuan efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah sudah cukup efektif namun kemampuan dalam mencukupi keuangan daerah Kabupaten Way Kanan masih sangat kecil. Hendaknya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dapat digali semaksimal mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan bagi daerahnya.

2. Bagi Peneliti

   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memiliki rentang waktu dan tempat yang lebih luas sehingga mampu memberikan hasil yang lebih maksimal pada analisis kinerja keuangan pemerintah daerah

3. Bagi Masyarakat

   Bagi masyarakat hendaknya mampu mendukung dan menjalankan dengan baik peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Dan juga masyarakat

memiliki peran dalam menyalurkan aspirasinya dan sebagai rambu-rambu bagi setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

LAMPIRAN

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN	PENDAPATAN
2010	8.745.820.446,48	408.205.931.484,00	479.038.907.939,48
2011	9.472.086.717,93	475.517.323.333,00	619.038.713.789,51
2012	10.148.122.569,52	579.328.013.519,00	696.739.560.610,78
2013	24.831.167.985,13	651.613.183.342,00	778.381.331.704,53
2014	45.811.422.786,00	701.026.300.811	871.294.716.363
2015	47.894.065.832,87	780.633.656.977,00	1.050.166.803.282
2016	37.271.665.575,84	908.456.210.688,00	1.157.764.082.244,84
2017	49.538.197.652,98	1.034.484.642.816,00	1.340.642.424.059,86

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2014). *PENGELOLAHAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN DAERAH*. (G. Ilmu, Ed.) (pertama). Yogyakarta.

Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *J u r n a l E K B I S*, *XIV*(2), 677–689.

Hakim, L. (2017). *Curup Gansa dan Pinang Indah, Air Terjun Eksotis Alam Way Kanan - Lampungpro.com*. Retrieved from https://lampungpro.com/post/1033/curup-gansa-dan-pinang-indah-air-terjun-eksotis-alam-way-kanan

Haryani. (2016). ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN. *Jurnal Kebangsaan*, *5*(9), 50–54.

Kesuma, B. J., & Arianti, F. (2013). ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008 - 2012. *Jurnal Ekonomi DIPENEGORO*, *2*, 1–6.

Lubis, D. K. P., & Hafni, N. (2017). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU TAHUN ANGGARAN 2011–2013. *Jurnal Kitabah*, *1*, 55–60.

Mahardika, I. G. N. S., & Artini, L. G. S. (2011). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, 733–750.

Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, *4*(1).

Pangenggar, T. L. I. (2017). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2005-2014*.

Pramono, J. (Dosen tetap S. A. S. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).(Joko Pramono). *Among Makarti*, *7*, 83–112.

Putri, S. R. (2018). *ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*.

Ramadhani, R. F. (2016). ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DI KOTA TARAKAN TAHUN 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *14*(01), 86–97.

Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2018). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Inovasi*, *13*(2), 92. https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2461

Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, *2*(1), 1–26. Retrieved from http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/871

Sriyana, J. (2009). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah : Studi. *Jurnal UNISIA*, *XXXII*, 209–227.

Sugiyono, D. P. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF,KUALITATIF DAN R&D*.

Vurry, A. N., Suwendra, W., & Yudiaatmaja, F. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004-2013. *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, *2*(1).

Way Kanan, P. K. W. K. (2018). Sejarah Kabupaten Way Kanan. Retrieved November 12, 2018, from http://www.waykanankab.go.id/pages/sejarah

Wurangian, S., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2017). ANALISIS KEMAMPUAN KEUNGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015). *Berkala Ilmiah Efisiensi*, *17*(01), 64–78.